

DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BULELENG**Putu Agung Krisna Dwipayana Putra ¹****I Nyoman Mahaendra Yasa ²****^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas SDM, UMK, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian di Kabupaten Buleleng dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 15 pengamatan dalam rentan waktu 2008-2022 dengan menggunakan data time series. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa 1) kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) Kualitas SDM dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan; 3) Kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten (UMK), berpengaruh secara tidak langsung, sedangkan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Kata kunci : *kualitas SDM, upah minimum kabupaten (UMK), investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the quality of human resources, UMK, and investment on economic growth and poverty levels in Buleleng Regency. The research location is in Buleleng Regency with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The number of observations in this study is 15 observations in the 2008-2022 timeframe using time series data. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis and path analysis. The results of the research show that 1) the quality of human resources, district minimum wages (UMK), and investment have a positive and significant effect on economic growth; 2) The quality of human resources and investment has a negative and significant effect, the district minimum wage (UMK) has a negative and insignificant effect, while economic growth has no negative and significant effect on the poverty rate; 3) The quality of human resources, the District Minimum Wage (UMK), has an indirect effect, while investment does not indirectly affect the poverty rate through economic growth in Buleleng Regency.

Keywords : *human resources quality, district minimum wage (UMK), investment, economic growth, poverty rate*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah hilang dan selalu identik dengan negara berkembang. Tingkat pendapatan nasional yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang lambat merupakan karakteristik dari negara berkembang secara umum. Pendapatan per kapita negara sedang berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya lambat bahkan mengalami stagnasi. Berdasarkan laporan World Bank (2015), kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan dan terdiri dari banyak dimensi. Termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk memperoleh barang dan jasa penting yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat. Kemiskinan juga mencakup tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, akses yang buruk terhadap air bersih dan sanitasi, fisik serta kesempatan yang tidak memadai untuk meningkatkan hidup seseorang. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan ekonomi yang merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara dan menjadi agenda setiap tahunnya.

Menurut BPS Provinsi Bali (2023), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan/kurangnya lapangan pekerjaan dan biasanya yang termasuk dalam kategori miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta investasi merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lainnya (Paramitha & Purbadharmaja, 2015). Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu penduduk miskin mempunyai sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas yang rendah berarti produktifitas menjadi rendah sehingga berpengaruh kepada upah yang diterima, dan adanya perbedaan akses dalam modal. Kuncoro (2004:120), mengemukakan penyebab dari terjadinya kemiskinan di suatu wilayah di antaranya; ketidaksamaan pola sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan kualitas SDM, dan perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan merupakan

sebuah permasalahan yang muncul juga berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, serta kebijakan pembangunan yang dilaksanakan daerah masing-masing (Kusumo, 2022). Oleh karena itu perlu upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena jika tidak diatasi akan menimbulkan efek yang kurang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan pada apapun bentuknya wajib bisa diatasi, dan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan jangka panjang adalah dengan melalui pembangunan manusia (Ramadhani & Munandar, 2019).

Kemiskinan merupakan indikator yang paling mudah digunakan dalam menilai kesejahteraan suatu negara (Samputra & Adis Imam Munandar 2019). Masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan yang tidak mudah hilang di tingkat nasional maupun daerah sehingga akibatnya wajib segera dicari solusinya. Selama satu dekade terakhir Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kemajuan dalam penurunan kemiskinan ini dicapai melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi serta pelaksanaan kebijakan sebagai upaya dalam pengetasan kemiskinan oleh pemerintah (Sumarto, 2014).

Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang sebagian besar pendapatan masyarakat bersumber dari sektor pariwisata. Kegiatan pariwisata adalah sektor yang berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah daerah maupun masyarakat (Irawan, 2015). Potensi ekonomi pariwisata yang dimiliki menjadi faktor kemajuan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Walaupun sudah ditunjang dengan potensi ekonomi oleh beberapa kabupaten serta majunya sektor pariwisata, Provinsi Bali disetiap kabupaten masih memiliki permasalahan kemiskinan yang menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Jembrana	5,20	4,88	4,51	5,06	5,30	4,99
2	Tabanan	4,46	4,21	4,27	5,12	5,15	4,64
3	Badung	1,98	1,78	2,02	2,62	2,53	2,19
4	Gianyar	4,19	3,88	4,08	4,85	4,70	4,21
5	Klungkung	5,86	5,40	4,87	5,64	6,07	5,57
6	Bangli	4,89	4,44	4,19	5,09	5,28	4,65
7	Karangasem	6,28	6,25	5,91	6,78	6,98	6,44
8	Buleleng	5,36	5,19	5,32	6,12	6,21	5,64
9	Denpasar	2,24	2,10	2,14	2,96	2,97	2,48
	Provinsi Bali	4,01	3,79	3,78	4,53	4,57	4,14

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan Kabupaten Buleleng menjadi wilayah dengan presentase kemiskinan tertinggi setelah Karangasem yang memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin mencapai 5,64 persen dibandingkan kabupaten lainnya serta sejak tahun 2019 tingkat kemiskinan yang terus mengalami kenaikan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan pariwisata di Bali, Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 presentase jumlah penduduk miskin yaitu 5,19 persen. Pada tahun 2020 presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng meningkat menjadi 5,32 persen dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 mencapai 6,21 persen. Ritonga & Tri (2020), mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memiliki hubungan dalam meningkatnya jumlah penduduk miskin mulai dari pengangguran, jumlah penduduk yang terus meningkat, pendidikan rendah, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan sebagainya. Dengan peningkatan jumlah penduduk miskin menandakan masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam proses perbaikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus segera untuk mencari jalan keluar sebagai upaya dalam pengetasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya melaksanakan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan pangan dan sandang, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan

perumahan, fasilitas pengolahan usaha kelompok, fasilitas kemitraan pemerintah daerah dan swasta. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang usaha, peningkatan permodalan bagi penduduk miskin, peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir, dan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng memperlihatkan penurunan. Hal tersebut ditunjukkan dari presentase tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan. Berdasarkan BPS Provinsi Bali (2023), menunjukkan pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng sebesar 5,36 persen dan turun di tahun 2019 menjadi 5,19 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 5,32 persen dan mengalami peningkatan di dua tahun setelahnya yaitu 2021 menjadi 6,12 persen dan tahun 2022 menjadi 6,21 persen. Kenaikan ini terjadi menurut Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana disebabkan akibat Pandemi Covid 19 yang menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi meningkat selama tahun 2020 (NusaBali.com, 2021). Keberhasilan Kabupaten Buleleng dalam mengatasi kemiskinan belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi yaitu di atas 5-6 persen yang menandakan masih tingginya tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi (Taufik, Eny Rochaida & Fitriadi, 2014), . Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan serta mengindikasikan bahwa pemerintah mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Boediono (2017:35), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Kualitas SDM merupakan faktor penting dalam pembangun ekonomi, dengan SDM yang berkualitas pembangunan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, diyakini akan lebih baik demikian sebaliknya. Todaro (2006:118), bahwa pertumbuhan ekonomi sangat

Determinan Pertumbuhan.....[Putu Agung Krisna Dwipayana Putra, I Nyoman Mahaendra Yasa]

dipengaruhi oleh SDM melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja. Pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dapat pula meningkatkan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi akan menjamin tersedianya dana yang cukup dalam meningkatkan kualitas SDM, dengan demikian terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (Putra & I Wayan Wenagama,2021).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, maka kesejahteraan dalam masyarakat akan jelas terlihat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan tingkat pengangguran akan menurun dari peningkatan industri yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (Priambodo, 2015). Studi Askenazy (2003), menjelaskan bahwa upah minimum memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Dengan meningkatnya upah minimum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kehidupan yang layak. Upah minimum harus dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Akibat peningkatan upah minimum akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Putra & I Wayan Wenagama,2021).

Investasi merupakan salah satu bagian penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Sukirno (2004:231), menyatakan bahwa investasi memungkinkan masyarakat untuk terus dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta meningkatkan taraf hidup kemakmuran masyarakat. Dengan adanya investasi diharapkan sebagai pendorong dalam percepatan pembangunan secara luas. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan multiplier effect terhadap sendi-sendi kehidupan, seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Semara & I Nyoman Mahaendra Yasa, 2021). Jika pertumbuhan ekonomi tinggi akan mengakibatkan bergairahnya aktivitas ekonomi dan merangsang tumbuhnya investasi serta semakin membuka kesempatan kerja yang lebih luas (Suarta, 2017). Arsyad (2010:82), menyatakan pertumbuhan ekonomi akan mampu sebagai penggerak roda ekonomi suatu wilayah, sehingga bisa dalam mengurangi kemiskinan.

Dengan pertumbuhan ekonomi akan mampu menekan angka kemiskinan, karena tingginya pertumbuhan ekonomi dapat mengoptimalkan pembangunan, sehingga kesejahteraan dapat dicapai. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat, karena tidak optimalnya pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat (Damanik & Selna, 2020). Joianis (2016), mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan maka akan terjadi penurunan kemiskinan. Anwar, dkk (2016), mengatakan hal yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Rendahnya kualitas pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan tingginya tingkat kemiskinan (Sofilda et al, 2014). Pembangunan manusia merupakan upaya dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai kualitas intelektual, moral, watak, akhlak, dan fisik yang prima (Mahsunah dan Dhiah, 2013). Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita. Mekanisme dalam penuntasan kemiskinan adalah dengan pengembangan Human Capital terutama pendidikan dan kesehatan (Ningtias, dkk, 2021). Pendidikan yang berkualitas dan produktivitas yang baik, serta kesehatan dalam ukuran harapan hidup telah diamati memiliki efek positif yang cukup besar terhadap ekonomi (Chotia & Rao, 2015).

Pendidikan yang rendah sangat berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan kemiskinan. Peningkatan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan kemiskinan (Todaro, 2006:436). Hal ini dikarenakan pendidikan akan meningkatkan produktifitas sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat miskin kemudian hal ini berakibat pada penurunan kemiskinan. Kemiskinan dan pendidikan memiliki keterkaitan, karena pendidikan akan memberikan keahlian dan kemampuan untuk berkembang lewat pengetahuan dan keterampilan (Purba dan Luh Putu Aswitari, 2017). Perkembangan pendidikan menurut rata-rata lama sekolah di Kabupaten

Buleleng dari tahun 2018-2022 menunjukkan presentase peningkatan yang sangat lambat pada setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan di Kabupaten Buleleng yang akan berdampak pada kemiskinan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 sebesar 7,04 tahun, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 7,56. Angka 7,56 mengandung arti rata-rata capaian lama tingkat pendidikan yang di tempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Buleleng atau hampir menamatkan kelas VIII di sekolah menengah pertama. Putri & Yuliarmi (2013), serta Saputra & Martini Dewi (2015), menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini bahwa pendidikan penting dan berpengaruh dalam menghasilkan SDA yang mutu dalam menurunkan kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selain pendidikan adalah rendahnya tingkat kesehatan (Seran, 2017). Kesehatan adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Leker, 2015). Kurun waktu lima tahun terakhir umur harapan hidup terus mengalami peningkatan, yaitu dari 71,36 pada tahun 2018 menjadi 72,32 pada tahun 2022. Adanya peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Buleleng menunjukkan derajat kesehatan masyarakat relatif membaik sehingga secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada penurunan kemiskinan. Menurut Mariyanti & Mahfudz (2016), dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk dapat memberikan dampak pada tingkat kemiskinan, sebab negara yang penduduknya sehat juga diyakini akan memiliki perekonomian yang sehat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2017), dan Anisa (2019), menunjukkan kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan kesehatan menjadi faktor penting dalam penurunan tingkat kemiskinan. Dengan tingkat kesehatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap SDM yang berkualitas sehingga kemampuan dalam mengakses lapangan kerja dan peluang dalam mendapatkan kesempatan kerja akan terbuka.

Aspek ekonomi merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM. Aspek ekonomi dalam peningkatan kualitas SDM sering digambarkan dengan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi. Pengeluaran perkapita penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan sampai tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 karena Covid-19, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadanisa dan Nunuk Triwahyuningtyas (2022), menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Kebijakan upah sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum. Adapun faktor-faktor yang dapat menentukan besarnya upah minimum yaitu kemampuan perusahaan, tingkat pengupahan di sektor atau sub sektor yang sama pada wilayah atau provinsi lain, kondisi perekonomian, dan standar kebutuhan kehidupan pekerja dan keluarga (Aprilia (2016); Rusdianti, dkk, (2018)).

Para pekerja menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi mengatasi kemiskinan. Dengan adanya kebijakan upah minimum ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung

kebutuhan dasar seperti: sandang, pangan, dan papan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi (Oktavini dan Gede Wardana, (2022)). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajriansyah dan Ika Chandriyanti (2018), menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya upah minimum, maka kemiskinan akan semakin menurun.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan salah satu faktor mempengaruhinya adalah investasi. Menurut Sukirno (2000:107), investasi adalah suatu pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah jumlah dari barang-barang modal dan alat-alat produksi yang digunakan untuk peningkatan aktivitas produksi sehingga, produktivitas yang didapat pada perekonomian akan meningkat. Thomas (2015), mengatakan bahwa investasi adalah kunci dalam memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu dalam memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh investasi barang modal, tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Peningkatan investasi (barang modal) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jika investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan jika investasi berkurang maka pertumbuhan ekonomi akan menurun (Pramesti & Mahaendra Yasa, 2019).

Menurut Ratih (2017), investasi merupakan salah satu penentu dari pembangunan nasional dan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan investasi dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan perekonomian, dengan investasi akan mendorong terbukanya lapangan pekerja yang lebih luas sehingga dapat tersedia bagi tenaga kerja di daerah. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah, yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut BPS Provinsi Bali (2023), adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan yang memadai juga menjadi pendorong investasi yang cukup signifikan (Warasita & Desy, 2021). Besarnya investasi fisik di daerah tidak lepas dari pengaruh sektor potensial yang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah tersebut (Omr, Kahouli, 2013). Kabupaten Buleleng adalah daerah potensi investasi pada sektor pariwisata dan pertanian yang dapat dikembangkan sehingga dapat mendorong roda perekonomian. Ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan yang memadai dapat mendorong investasi yang cukup signifikan. Dengan adanya investasi yang kuat terhadap sektor potensial tersebut akan semakin besar berkontribusi terhadap roda ekonomi. Arshanti (2015), menjelaskan bahwa, investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi investasi, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Buleleng. Data pada tahun 2008 sampai 2022 sebagai data penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan apa yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini. Kabupaten Buleleng dipilih menjadi lokasi penelitian karena presentase penduduk miskin menurut kabupaten/ kota Tahun 2018-2022 di Provinsi Bali, menunjukkan cenderung mengalami peningkatan dengan presentase kemiskinan mencapai 5-6 persen serta jika dilihat dari daerahnya Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang luas dan memiliki potensi baik pariwisata maupun pertanian namun menempati posisi kedua dengan tingkat kemiskinan rata-rata tergolong tinggi setelah Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan, merupakan pengumpulan data yang tidak secara langsung

terlibat dalam mendapatkan data, karena tidak ada mengalami kontak langsung pada objek penelitian serta sebagai pengamat independent yang mencatat, menganalisis, serta membuat kesimpulan tentang objek penelitian (Sugiyono, 2019:203). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, variabel eksogen adalah kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten, investasi, variabel intervening adalah pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Didapat 2 persamaa struktural yang menunjukkan hubungan variabel yang dihipotesiskan yaitu.

$$Y1 = \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + e1.....(1)$$

$$Y2 = \beta4X1 + \beta5X2 + \beta6X3 + \beta7Y1 + e2.....(2)$$

Keterangan :

Y1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y2 = Tingkat Kemiskinan

X1 = Kualitas SDM

X2 = Upah Minimum Kabupaten (UMK)

X3 = Investasi

$\beta1, \beta2, \beta3, \beta4, \beta5, \beta6, \beta7,$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

$e1, e2$ = Error

Hasil kekeliruan taksiran standar, yaitu :

$$e = \sqrt{1 - R^2}.....(3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 26 terhadap model persamaan regresi. Pengujian persamaan satu dilakukan untuk melihat pengaruh kualitas SDM, Upah

Minimum Kabupaten (UMK), dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi 1

Variabel	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-189.727	49.122			-3.862	.003
Kualitas SDM	.744	.141	1.428		5.260	.000
Upah Minimum Kabupaten	2.385	1.018	.467		2.344	.039
Investasi	7.096	2.025	.897		3.503	.005

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas SDM dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0.744 dengan sig 0.000 < 0.05 menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 2,385 dengan sig 0,039 < 0,05 menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 7,096 dengan sig 0,005 < 0,05 menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut hasil pengujian pengaruh langsung kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam tabel 2 menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM yang diukur dengan IPM mampu secara maksimal mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM di Kabupaten Buleleng yang terus meningkat akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga menghasilkan produktivitas yang meningkat. Hal ini mendukung pendapat Todaro (2006:118), bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh SDM melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja. Serta mendukung

penelitian yang dilakukan Farah dan Erlinda (2014), yang menjelaskan modal manusia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan produktivitas suatu perekonomian.

Menurut hasil pengujian pengaruh langsung Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam tabel 2 menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Memiliki arti bahwa bila tingkat upah bertambah, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan asumsi variabel lain konstan. Upah minimum sebagaimana yang dikemukakan dalam teori upah efisiensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, sehingga akan berdampak pada meningkatnya hasil produksi suatu perusahaan, kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Pekerja yang mendapat upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori upah efisiensi yang menjelaskan bahwa dengan upah yang tinggi, maka para pekerja akan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan, dengan demikian pekerja akan merasa lebih memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama berada di tempat pekerjaannya. Dampak secara ekonomi yang di munculkan bagi perusahaan adalah tingginya produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan sejalan dengan hasil penelitian Lestari dan I Nyoman Mahaendra Yasa (2023), dan penelitian oleh Putra dan I Nyoman Mahendra Yasa (2020), yang menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut hasil pengujian investasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam tabel 2 menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan banyak investasi fisik yang dibangun seperti jalan, mesin, dan peralatan yang menunjang sektor potensial seperti pertanian dan pariwisata yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa (Sukirno, 2007:256-257). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2019), yang menyatakan peningkatan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jika investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan sebaliknya.

Pengujian persamaan dua dilakukan untuk melihat pengaruh kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi 2

Variabel	<i>Coefficients^a</i>				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	119.980	29.903		4.012	.002
Kualitas SDM	-.469	.105	-2.509	-4.466	.001
Upah Minimum Kabupaten	-1.034	.494	-.563	-2.092	.063
Investasi	-4.486	1.166	-1.581	-3.847	.003
Pertumbuhan Ekonomi	.493	.119	1.373	4.146	.002

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa kualitas SDM dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar -0,469 dengan sig 0,001 < 0,05 menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Upah Minimum

Kabupaten (UMK) dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar $-1,034$ dengan $\text{sig } 0,063 < 0,05$ menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar $-4,486$ dengan $\text{sig } 0,003 < 0,05$ menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar $0,493$ dengan $\text{sig } 0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh langsung kualitas SDM terhadap tingkat kemiskinan yang disajikan dalam tabel 3 menunjukkan kualitas SDM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nukrese yang menjelaskan bahwa lingkaran setan kemiskinan diawali dengan adanya produktivitas yang rendah yang menyebabkan penghasilan yang di dapat juga rendah. Produktivitas yang rendah sangat berhubungan erat dengan rendahnya kualitas SDM. Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut perlu adanya pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita. Dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli yang baik akan menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas manusia melalui pembangunan berbasis pengembangan dan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta mendukung kehidupan yang lebih layak, dapat efektif menurunkan tingkat kemiskinan (Wididarma & Made Jember, 2021).

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh langsung Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan yang disajikan dalam tabel 3 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan upah minimum belum secara maksimal dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, hal ini disebabkan sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Kabupaten Buleleng adalah sektor pertanian, jasa, dan diikuti perdagangan dimana sektor pertanian dan jasa adalah sektor informal. Mayoritas pekerja di Kabupaten Buleleng adalah sektor informal sehingga belum bisa dalam

mensejahterakan masyarakat. Sektor informal ini dekat dengan upah yang rendah dan kemiskinan karena identik dengan memiliki kualitas sumber daya yang rendah (Nariswari, 2020). Hasil ini tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, yaitu dengan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Gung, dkk. (2019) yang menyatakan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan semata tetapi kegagalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh langsung investasi terhadap tingkat kemiskinan yang disajikan dalam tabel 3 yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi mengalami peningkatan, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Investasi dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan nilai pembentukan modal tetap bruto. PMTB hanya berfokus pada investasi langsung. Investasi langsung merupakan investasi yang digunakan untuk pengeluaran barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Pengeluaran barang modal biasanya akan berfokus pada mesin-mesin yang digunakan melakukan operasional. Mesin operasional akan membutuhkan operator dari tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Belanja barang modal akan menggerakkan industri UMKM. Belanja barang modal yang dilakukan pemerintah daerah juga memungkinkan perputaran ekonomi yang menyebabkan masyarakat memiliki pendapatan. Hasil ini mendukung teori lingkaran kemiskinan menjelaskan bahwa pembentukan modal (investasi) sangat berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat. Dengan investasi yang rendah akan berpengaruh terhadap kurangnya modal, sehingga berpengaruh terhadap produktifitas yang rendah dan pendapatan dari pekerja akan ikut menurun. Pendapatan yang menurun akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan di masyarakat. Besarnya investasi yang masuk akan memberikan dorongan yang kuat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Warasita & Desy (2021), menjelaskan bahwa investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yang disajikan dalam tabel 3 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng akan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan, ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif atau pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja. Adanya pengaruh tidak negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan ini tidak sejalan dengan Mankiw (2000:158), menjelaskan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Ketika Pertumbuhan ekonomi meningkat, akan membuat perusahaan menambah produksi. Dengan meningkatnya produksi akan berpengaruh terhadap peningkatan upah yang diterima tenaga kerja. Sehingga pendapatan yang meningkat membuat taraf hidup layak mereka meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Made Suyana Utama (2019), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Menghitung nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variansi variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh kualitas SDM, Upah Minum Kabupaten (UMK), dan investasi dihitung dengan menggunakan rumus.

$$P_{e_1} = \sqrt{1 - R_1^2} = \sqrt{1 - 0.729} = 0,271$$

Sementara itu, untuk menghitung nilai e_2 yang menunjukan variabel tingkat kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh kualitas SDM, Upah Minum Kabupaten (UMK), investasi, dan pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan rumus.

$$P_{e_2} = \sqrt{1 - R_2^2} = \sqrt{1 - 0.706} = 0,294$$

Untuk memeriksa variabel model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut.

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2(Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,271)^2(0,294)^2 \\ &= 1 - 0,010164 = 0,993 \end{aligned}$$

Nilai determinasi total sebesar 0,993 mempunyai arti bahwa sebesar 99,3% variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten (UMK), investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya yaitu 0,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengaruh tidak langsung dari kualitas SDM terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil pengujian Z hitung sebesar $20,44 > 1,96$, artinya pertumbuhan ekonomi (Y1) merupakan variabel yang memediasi kualitas SDM (X1) terhadap tingkat kemiskinan (Y2) di Kabupaten Buleleng atau dengan kata lain kualitas SDM berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tidak langsung dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng, hasil pengujian Z hitung sebesar $2,63 > 1,96$, artinya pertumbuhan ekonomi (Y1) merupakan variabel yang memediasi Upah Minimum Kabupaten (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y2) di Kabupaten Buleleng atau dengan kata lain Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tidak langsung investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng, berdasarkan hasil pengujian Z hitung sebesar $1,21 < 1,96$, artinya pertumbuhan ekonomi (Y1) bukan variabel yang memediasi investasi (X3) terhadap tingkat kemiskinan (Y2) di Kabupaten Buleleng atau dengan kata lain investasi tidak secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng melalui pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Menurut hasil dari analisis data yang Kualitas SDM, Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Kualitas SDM dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Kualitas SDM dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), berpengaruh secara tidak langsung sedangkan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan untuk terus melakukan program-program untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. program-program bantuan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dari pemerintah perlu ditingkatkan agar masyarakat miskin yang dapat menikmati pendidikan, kesehatan, dan terbukanya akses lapangan pekerjaan. Dalam peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan pemerintah dapat menjaga komitmen dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 dan kesehatan minimal 10 persen dari APBD sesuai amanat undang-undang. Dengan peningkatan fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dirasa sangat penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah menyesuaikan tingkat upah dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi penetapan UMK didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Dalam penerapan upah harus ada ketegasan pihak pemerintah untuk melakukan monev, dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak berkomitmen dalam memberikan upah sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng juga dapat lebih memperhatikan pengembangan iklim investasi melalui pengembangan potensi daerah agar bisa dikembangkan dengan

baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah harus memperhatikan regulasi, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesadaran warganya dalam berinvestasi agar dapat mempermudah dalam masuknya investasi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng cenderung fluktuatif dan sebab itu memacu pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi disertai dengan pendistribusian pendapatan yang merata akan memberikan efek yang lebih maksimal terhadap penurunan kemiskinan. Pengembangan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi daerah dapat dilakukan dengan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; Pelayanan dasar serta penguatan infrastruktur; Pemenuhan jaminan sosial dan peningkatan pelayanan publik; Pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

REFERENSI

- Akmad, Fajar Azzam Pasha.(2016). Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Parameter*,1(2).Hal:1-11.
- Anisa Putri Zahrah.(2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah wanita yang bekerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*,7(2),Hal:1-11.
- Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. L.(2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,16(2), Hal :218-232.
- Anwar,Aminuddin.(2017). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa.Jurnal Ekonomi,13(1),Hal:79-94.
- Arshanti, Kadek Novita, & I.G.A.P Wirathi.(2015). Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(5),Hal:514- 524.
- Askenazy, Philippe. (2003). Minimum Wage, Export, and Growth. *European Economic Review* 47.Pp 114-167.
- Aprilia, Rizki Dita. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Kemiskinan, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*,4(2).Hal:1-19.

- Determinan Pertumbuhan.....[Putu Agung Krisna Dwipayana Putra, I Nyoman Mahaendra Yasa]
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.(2023).PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Buleleng (Juta Rupiah), 2018-2022.BPS Kabupaten Buleleng. Singaraja.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.(2023).Konsep PMTB.BPS Provinsi Bali. BPS Provinsi Bali. Denpasar
- Capeding, M. R., Chua, M. N., Hadinegoro, S. R., Hussain, I. I. H. M., Nallusamy, R., Pitisuttithum, P, Wirawan, D. N. (2013). Dengue and other common causes of acute febrile illness in Asia: an active surveillance study in children. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 7(7), e2331.
- Chotia, Varun, & Rao, N. V. M. (2015). Examining the interlinkages between regional infrastructure disparities, economic growth, and poverty: A case of Indian States. *Economic Annals*, 60(205), 53–71.
- Damanik Kesatriani, Rapika & Selna Aprlia Sidaruk.(2020).Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*,28(3),Hal: 358:368.
- Dewatapost.(2022).Pembangunan Tetap Melaju, Buleleng Bersiap Bangkit Lebih Tinggi. Diakses pada 23 Juni 2023, dari dewatapos.com/pembangunan-tetap-melaju-buleleng-bersiap-bangkit-lebih-tinggi/
- Fajriansyah, Sama & Ika Chandriyanti. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.*Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*,5(2),Hal:558-570.
- Farah,Alfa & Erlanda Puspita Sari.(2014).Modal Manusia dan Produktivitas.*Journal of Economics and Policy*,7(1),Hal:22-28.
- Gung, A'ing, E. Rochaida , dan Fitriadi. 2019. Pengaruh Upah Minimum dan Pendidikan Serta Tingkat Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Antar Provinsi Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman*.4(4), Hal:63-75.
- Husna,Naufallia Hernimas,Togar Laut, & Panji Kusuma Prasetyanto.(2020) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2004-2018. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*,2(2).Hal:318-334.

- Irawan, Andi. (2015). Regional Income Disparities In Indonesia: Measurements, Convergence Process, And Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES), 51(1) pp:148-149.
- Jolianis.(2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal Of Economic Education*, 4(2).Hal:192-209.
- Kaur, M., & Singh, L.(2016). Knowledge in the economic growth of developing. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 8(20),Pp:205-212.
- Kusumo,Bagus Haryo.(2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*,10(2),Hal:1-21.
- Leker, Laura and Gregory Ponthiere. (2015). Education, Life Expectancy and Family Bargaining: the Ben-Porath Effect Revisited. *Journal of Education Economics*,23(4),.pp. 481.
- Lestari, Leni & I Nyoman Mahaendra Yasa.(2023). Pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota di Provinsi Bali.*E-Jurnal FEB Unud*. 12(6), Hal:1139-1151.
- Manning, C., dan Pratomo, D. S. (2013). *Do migrants get stuck in the informal sector? Findings from a household survey in four Indonesian cities. Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 49 (2).
- Mahsunah, Durrotul & Dhiah Fitrayati. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(3), Hal: 1-17.
- Marini, Tety. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*, 12 (1), 108-137.
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic Circular Causation Model in Poverty Alleviation: Empirical evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), Pp: 275-299.
- Nariswari,Renanta.(2020). Analisis Peranan Sektor Informal Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*,10(2),Hal:1-14.

- Determinan Pertumbuhan.....[Putu Agung Krisna Dwipayana Putra, I Nyoman Mahaendra Yasa]
- Ningtias, E. N. A., dan Anwar, A.F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BIES)*, 1 (1), hal.1-12.
- Oktaviani, Nadya & Gede Wardana (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. . *E-Jurnal EP Unud*,11(02),Hal:693-718.
- Omr, Kahouli. (2013).The Nexus Among Foreign Investment,Domestic Capital And Economic Growth: Empirical Evidence From The MENA Region. *Research In Economics* 68 (2014),PP:257–263.
- Paramita, A. A Istri Diah., & I. B Purbadharmaja.(2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*,4(10),Hal:194-1218.
- Parwa Adi, I Gusti Ngurah Jana Loka & I Gusti Wayan Murjana Yasa.(2019).Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali.*E-Jurnal EP Unud*.8(5),Hal:945-1180.
- Ramadhani, A.W. & Munandar, A.I.(2019).Determinan Kemiskinan Anak di Provinsi DKI Jakarta: Susenas 2017. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,12(2). Hal : 111-123.
- Ratih, Putu Ayu Gusti Ambara,Made Suyana Utama & I Nyoman Mahendra Yasa.(2017).Pengaruh Investasi,Pengeluaran Pemerintah,Tenaga KerjaTerhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.*E-Jurnal EP Unud*, 6(10).Hal:29-54.
- Ritonga, M., & Tri Wulantika.(2020). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018). *Jurnal Diversita*,6(1).Hal: 95-102.
- Samputra, Palupi Lindiasari & Adis Imam Munadar. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.12(1),Hal 35-46.
- Sanjaya, Putu Bagus Krisna Adi & I Made Jember. (2021). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provisi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(9). Hal: 2072-2101
- Saputra, I Putu Eka, dan Ni Putu Martini Dewi.(2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi dan Belanja Pembangunan terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*,4(2).Hal :105-112.

- Sofilda, E., Hamzah, M., & Sholeh, A. (2014). Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression). *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 06(06), Pp :51–62.
- Suartha, Nyoman. 2017. Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk, Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1):95-107.
- Sumarto, Sudarno. (2014). Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence From Decentralized Indonesia. SMERU Research Institute, European Commission, The World Bank.
- Taufi, Eny Rochaida & Fitriadi Fitriadi. (2015). Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2). Hal:90-101.
- Thomas, Linblad. (2015). Foreign Direct Investment In Indonesia: Fifty Years Of Discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, 5(1).pp: 217-237.
- Warasita, Ketut Ayunda & Putu Desy Apriliani. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 5(6), Hal:2341-2370.
- Wiagustini, Ni Luh Putu., Luh Gede Meydianawathi, I Ketut Mustanda, & Nyoman Abundanti. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2), Hal:155-173.
- Yanthi, Ni Putu Sri Puspita & I Ketut Sutrisna. (2021). Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(5), Hal:1774 - 2222.
- Yolanda, Pateda, Vecky AJ, Masinambouw, dan Tri Oldy Rotinsulu. (2017). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 19(3), Hal : 1-17.
- Zaman, K., Ahmad, B., Awan, U., Ali, G., and Naseem, I. (2014). Measuring pro-poor sectoral analysis for Pakistan: trickle down?. *Economic Research–Ekonomiska Istraživanja*, 27 (1), Hal: 713–728.